

PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR

2025

PERGUB JATENG NO. 2, BD 2025/ NO. 2, 3 HLM

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH BIDANG PERHUBUNGAN SERTA ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

- ABSTRAK : - dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perhubungan serta energi sumber daya mineral, serta diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengakibatkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu dicabut. Berdasarkan hal tersebut perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Bidang Perhubungan Serta Energi Dan Sumber Daya Mineral.
- Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 30 Tahun 2007; UU No. 22 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 5 Tahun 2021; PERPRES No. 106 Tahun 2022; PERDA PROV DAERAH No. 14 Tahun 2019; PERDA PROV JATENG No. 1 Tahun 2020..
- Peraturan Gubernur ini mengatur pernyataan pencabutan dan ketidakberlakuan 6 (enam) Peraturan Gubernur Jawa Tengah di Bidang Perhubungan serta Energi dan Sumber Daya Mineral yaitu :
- a. Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemberian Izin Pembangunan Dan Pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional Di Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Angkutan Orang Dan Barang Dengan Kendaraan Umum Di Jalan;
 - c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengendalian Muatan Angkutan Barang Dijalan;
 - d. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Panas Bumi Di Provinsi Jawa Tengah;
 - e. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27A Tahun 2017 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dan Kendaraan Angkutan Barang Pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2017 Di Jalan Provinsi Wilayah Jawa Tengah;
 - f. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 tahun 2019 tentang Rencana Induk Pelabuhan Batang (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019).

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Februari 2025.